



Permukiman Kumuh: Menguak Masalah dan Tantangan Perkotaan

Slums: Uncovering Urban Problems and Challenges

Mohammad Amin Lasaiba^{1*}

¹Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Article Info

Kata Kunci:

Permukiman Kumuh,
Tantangan, Perkotaan

Submitted: | 2024-01-23
Revised: | 2024-01-19
Accepted: | 2024-03-07
Published: | 2024-04-30

ABSTRAK

Permukiman kumuh mewakili masalah sosial dan ekonomi yang kompleks yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif tentang tantangan permukiman kumuh. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur untuk memahami secara mendalam konteks permasalahan permukiman kumuh. Temuan penelitian menyoroti bahwa permukiman kumuh adalah tantangan global yang kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, dipicu oleh urbanisasi yang cepat dan tingkat ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Pemerintah memainkan peran kunci dalam merancang kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memantau program-program perbaikan permukiman kumuh. Melalui kerjasama yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan, dengan tujuan mengentaskan permukiman kumuh secara berkelanjutan.

Keywords:

*Slum Settlements,
Challenges, Urban*

ABSTRACT

Slum settlements represent a complex social and economic issue many countries face worldwide. This research aims to provide a comprehensive insight into the challenges of slum settlements. The study employs a literature review method to understand the context of slum settlement issues deeply. The research findings highlight that slum settlements are a complex global challenge many countries face, driven by rapid urbanization and high levels of economic inequality. Cooperation between governments, the private sector, and civil society organizations is crucial to address these challenges. Governments play a key role in designing policies, allocating resources, and monitoring slum improvement programs. Through effective collaboration between governments, the private sector, and civil society organizations, holistic and sustainable solutions are expected to improve housing conditions, facilitate access to basic services, and enhance the quality of life for urban residents, with the ultimate goal of sustainably eradicating slum settlements.

*Corresponding Author:

Mohammad Amin Lasaiba

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan IPS FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

E-mail: Lasaiba.dr@gmail.com

ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0002-5363-6198>

Panduan Sitasi: Lasaiba, M. (2023). Permukiman Kumuh: Menguak Masalah dan Tantangan Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia*, 3(3), 22-33. <https://doi.org/10.30598/jp17iss1pp22-33>

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang kompleks yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Permukiman kumuh adalah kawasan

permukiman yang terdiri dari rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang layak serta seringkali tidak memiliki akses yang memadai ke layanan dasar seperti air bersih dan listrik (Oluwafemi, 2013). Permukiman kumuh sering kali menjadi tempat tinggal bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu ekonomi dan biasanya terletak di daerah yang tidak aman, seperti daerah rawan banjir atau bencana alam (Gilbert, 2005). Selain itu, permukiman kumuh seringkali terletak di pinggiran kota atau daerah perkotaan yang kurang berkembang, yang merupakan hasil dari urbanisasi yang cepat (Satterthwaite, 2008). Ketika penduduk desa bermigrasi ke kota-kota besar dalam mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik, mereka seringkali mendapati diri mereka tinggal di lingkungan yang penuh tantangan (Ramadhano & Lie, 2023). Kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan menciptakan lingkungan yang sulit bagi penduduk permukiman kumuh (Anisyaturrobiah, 2021). Oleh karena itu, masalah permukiman kumuh tidak hanya berdampak pada kualitas hidup penduduknya, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terkait dengan ketidaksetaraan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan ketahanan terhadap bencana di tingkat perkotaan (UN-Habitat, 2016). Upaya yang serius dan kolaboratif dari pemerintah, LSM, dan komunitas lokal diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks ini dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh di seluruh dunia.

Urbanisasi adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pembentukan permukiman kumuh. Ketika orang bermigrasi dari pedesaan ke kota dalam jumlah besar, tekanan besar terhadap sumber daya perumahan terjadi. Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menciptakan tekanan pada pemukiman perkotaan, mengakibatkan pertumbuhan permukiman kumuh. Akibatnya, banyak penduduk perkotaan terpaksa tinggal di permukiman kumuh yang seringkali tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan (Satterthwaite, 2008). Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi yang tidak terkendali, dan ketidaksetaraan ekonomi adalah faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman kumuh (Saini, 2016). Kurangnya regulasi dalam pembangunan dan pengelolaan lahan yang buruk oleh pemerintah lokal semakin memperparah masalah ini. Permukiman kumuh juga sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2018), kurangnya akses ke fasilitas sanitasi yang memadai dapat meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh. Faktor utama yang menyebabkan permukiman kumuh di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat dan kurangnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak (Akbar & Edelenbos, 2020). Masalah ini semakin diperparah oleh ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat. Disparitas ekonomi ini memaksa banyak individu berpenghasilan rendah tinggal di permukiman kumuh karena harga perumahan yang tidak terjangkau.

Konsekuensi dari meluasnya permukiman kumuh meliputi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Kondisi perumahan yang buruk dalam permukiman kumuh dapat menghambat perkembangan penduduk dalam berbagai cara, seperti mengganggu pendidikan, memburuknya kesehatan, dan membatasi peluang ekonomi (Zubaidah et al., 2023). Permukiman kumuh seringkali tetap terisolasi dari layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan (Agustin & Hariyani, 2023). Tantangan besar lainnya adalah kurangnya akses ke fasilitas sanitasi yang memadai di permukiman kumuh. Dalam hal ini, akses terbatas atau tidak ada akses ke air bersih dan sanitasi bersih dapat meningkatkan risiko penyakit dan kematian di antara penduduk permukiman kumuh (UN-Habitat, 2016). Selain itu, hanya sebagian kecil permukiman kumuh yang memiliki akses ke jaringan sanitasi yang layak, termasuk pasokan air bersih dan fasilitas toilet yang memadai. Kurangnya akses ini dapat meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016). Oleh karena itu, perhatian serius diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi di permukiman kumuh.

Tindakan menyeluruh diperlukan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. Pengentasan permukiman kumuh memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang efektif dalam memperbaiki kondisi perumahan dan memfasilitasi akses ke layanan dasar (Habitat for Humanity, 2018). Perencanaan perkotaan yang berkelanjutan dan kebijakan inklusi sosial juga perlu diperkuat (Warsilah, 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengatasi permukiman kumuh agar solusi yang diimplementasikan benar-benar berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan.

Banyak organisasi internasional dan pemerintah telah mencoba mengatasi masalah permukiman kumuh. Perbaikan permukiman kumuh melibatkan berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Crispi et al., 2022). Peran aktif pemerintah juga diperlukan dalam merancang kebijakan yang mendukung pengentasan permukiman kumuh dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menginisiasi upaya penanggulangan permukiman kumuh di Indonesia. Program-program seperti "Kampung Kumuh" dan "Program Kota Tanpa Kumuh" telah dicanangkan untuk merubah wajah permukiman kumuh di Indonesia (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016). Namun, koordinasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal sangat penting untuk merancang dan melaksanakan program-program ini secara efektif (Herdiansah, 2017). Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan juga merupakan langkah penting dalam membantu masyarakat kumuh meningkatkan taraf hidup (Khairunnisa et al., 2020).

Dalam mengatasi permukiman kumuh, sebuah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, upaya kolaboratif dari pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal sangatlah penting. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan permukiman kumuh adalah hal yang penting (UNDP, 2016). Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa masalah permukiman kumuh dapat dikurangi dan kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh dapat ditingkatkan. Meningkatkan akses ke perumahan yang layak, infrastruktur sanitasi yang memadai, dan peluang ekonomi akan menjadi langkah penting dalam mengentaskan permukiman kumuh di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang bertujuan mendalam memahami konteks permasalahan permukiman kumuh. Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap beragam sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Prinsip utama adalah memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai permasalahan permukiman kumuh, meliputi identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, studi literatur juga membantu dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang telah diajukan atau diterapkan dalam penelitian sebelumnya untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. Hasil dari studi literatur ini berperan penting dalam merumuskan kerangka teoritis yang kokoh. Dengan memahami konsep-konsep, teori-teori, dan model-model yang telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya, peneliti mampu mengidentifikasi kerangka kerja yang sesuai dengan konteks penelitian mereka. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengenali area-area yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan merupakan upaya sistematis untuk mengakses dan mengumpulkan informasi yang relevan dari beragam sumber literatur seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen tertulis lainnya (Nilamsari, 2014). Penggunaan database akademik seperti PubMed, Google Scholar, Scopus, atau ProQuest menjadi instrumen yang sangat berguna dalam mencari artikel jurnal, tesis, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap keandalan, relevansi, dan metodologi penelitian dari setiap sumber literatur yang

ditemukan, sehingga hanya sumber-sumber berkualitas tinggi yang akan dimasukkan dalam analisis data.

Analisis data dari studi kepustakaan merupakan tahap yang mendasar dalam penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka teoritis yang sudah ada dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik penelitian. Proses dimulai dengan identifikasi sumber-sumber relevan, seperti buku, artikel, dan laporan penelitian, yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti. Selanjutnya, dengan mengklasifikasikan dan mengorganisir sumber-sumber tersebut, peneliti menciptakan kerangka kerja yang membantu dalam pengaturan informasi, mempermudah akses ke temuan-temuan kunci, dan memungkinkan identifikasi pola atau tren dalam literatur. Evaluasi kualitas sumber-sumber literatur melibatkan pertimbangan tentang metodologi penelitian yang digunakan, relevansi dengan topik penelitian, dan keandalan informasi yang disajikan. Setelah itu, sintesis informasi dari berbagai sumber literatur membantu peneliti untuk menggabungkan temuan-temuan utama dan memahami gambaran yang lebih luas tentang topik penelitian. Identifikasi kesenjangan dalam literatur memungkinkan peneliti untuk menentukan di mana penelitian lebih lanjut diperlukan dan bagaimana penelitian tersebut akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang ada dalam bidang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permukiman Kumuh sebagai Masalah Global

Permukiman kumuh, juga dikenal sebagai "kawasan kumuh" dalam bahasa Inggris, merupakan masalah global yang mendalam dan kompleks yang telah menjadi ciri khas dari lanskap perkotaan di berbagai belahan dunia. Fenomena ini mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem dan kegagalan sistem perumahan dalam menyediakan kondisi hidup yang layak bagi semua penduduk perkotaan. Permukiman kumuh dapat ditemukan di berbagai lokasi, termasuk kota-kota besar, daerah pedesaan, dan pinggiran perkotaan, menjadi manifestasi tragis dari masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang memengaruhi populasi global. Permukiman kumuh tidak dapat direduksi hanya menjadi sekumpulan rumah yang miskin atau kurang terawat namun adalah cerminan yang mendalam dari ketidaksetaraan ekonomi yang mendalam, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam sistem perumahan yang sering gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Permukiman kumuh dapat ditemukan di seluruh dunia, mulai dari kota metropolitan yang padat penduduk hingga desa-desa terpencil, menggambarkan dampak global dari masalah ini.

Salah satu karakteristik utama permukiman kumuh adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai contoh, Permukiman kumuh di berbagai kota di seluruh dunia sering kali memiliki tingkat kepadatan penduduk yang jauh melebihi standar kesejahteraan. Rumah-rumah sering kali dibangun secara sembarangan, menghasilkan jalan-jalan yang sempit dan berliku yang sulit dilalui (Khan et al., 2023). Kepadatan ini menciptakan kondisi yang tidak sehat dan tidak aman bagi penduduk, terutama dalam situasi bencana alam atau darurat (Dickson-Gomez et al., 2023). Fasilitas sanitasi yang terbatas dan seringkali tidak memadai menjadi masalah serius, dengan akses terbatas ke fasilitas toilet yang layak. Akibatnya, penduduk sering kali terpaksa menggunakan sumber air yang tidak aman, meningkatkan risiko penyakit yang dapat menghancurkan komunitas (Agustina et al., 2023). Salah satu lokasi umum permukiman kumuh adalah di pinggiran kota besar. Kota-kota ini sering menjadi daya tarik bagi individu yang miskin yang mencari pekerjaan dan peluang kehidupan yang lebih baik. Namun, biaya tinggi perumahan di pusat kota sering kali memaksa banyak orang bermigrasi ke pinggiran kota untuk mencari perumahan yang lebih terjangkau. Akibatnya, permukiman kumuh tumbuh pesat di sepanjang pinggiran kota ini, menggantikan lahan kosong atau wilayah pedesaan yang sebelumnya belum tersentuh (UN-Habitat, 2016).

Kehidupan di permukiman kumuh di pinggiran kota sering kali penuh dengan tantangan. Rumah-rumah sering kali dibangun tanpa perencanaan yang tepat dan seringkali tidak memenuhi standar konstruksi yang aman, meninggalkan penduduk rentan terhadap

bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Patri et al., 2022). Aksesibilitas ke tempat kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai sering kali terbatas akibat infrastruktur jalan yang buruk atau kurangnya transportasi umum yang handal (Nss et al., 2015). Selain tantangan fisik yang dihadapi oleh penduduk permukiman kumuh, ada juga dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Lingkungan hidup yang tidak sehat dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat menghambat perkembangan anak-anak dan remaja yang tinggal di permukiman kumuh. Peluang pendidikan yang terbatas sering kali memperpetuasi siklus kemiskinan yang sulit diputuskan. Dari segi ekonomi, penduduk permukiman kumuh sering kali bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak stabil. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi seringkali terbatas (UNDP, 2016).

Untuk memahami akar masalah permukiman kumuh, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhannya. Salah satu faktor utama adalah urbanisasi yang cepat. Banyak orang dari pedesaan bermigrasi ke kota dalam jumlah besar, menciptakan tekanan besar pada sumber daya perumahan perkotaan. Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menciptakan tekanan pada permukiman perkotaan terutama terlihat di kota-kota yang mengalami pertumbuhan cepat tanpa perencanaan yang memadai (Satterthwaite, 2008). Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat juga menjadi faktor penting, terutama di negara-negara berkembang. Regulasi pembangunan yang buruk dan pengelolaan lahan yang tidak memadai oleh pemerintah lokal juga berkontribusi pada masalah ini. Di beberapa kasus, mungkin ada keterbatasan akses penduduk ke lahan yang sesuai untuk perumahan, sehingga penduduk terpaksa tinggal di wilayah yang rawan bencana atau tidak aman.

Penting untuk diingat bahwa masalah permukiman kumuh bukanlah isu yang terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu. Ini adalah masalah global yang memengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Urbanisasi yang cepat, ketidaksetaraan ekonomi, dan regulasi pembangunan yang buruk adalah faktor-faktor umum yang menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh di berbagai negara. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah ini harus memiliki dimensi global. Kolaborasi lintas negara dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam upaya mengatasi masalah permukiman kumuh. Negara-negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan penyediaan perumahan yang layak bagi semua penduduk perkotaan. Ini melibatkan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik dalam menghadapi masalah ini. Dalam konteks global, permukiman kumuh mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang mendalam dan kegagalan sistem perumahan dalam menyediakan hak dasar tempat tinggal yang layak bagi semua penduduk perkotaan. Ini adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius dan tindakan kolektif untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Faktor Penyebab Pertumbuhan Permukiman Kumuh

Faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan permukiman kumuh sangat kompleks dan mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan urbanisasi yang melibatkan banyak aspek. Dalam konteks ini, dua faktor utama yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan permukiman kumuh adalah urbanisasi yang cepat dan tingginya ketidaksetaraan ekonomi. Urbanisasi yang cepat adalah proses migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota, seringkali terjadi dengan cepat dan dalam skala besar. Pencarian peluang ekonomi, pekerjaan, dan gaya hidup yang lebih baik di perkotaan secara utama memicu urbanisasi ini. Ini menyebabkan kota-kota menjadi pusat pertumbuhan penduduk yang signifikan. Namun, urbanisasi yang tidak terkontrol atau tidak terencana dengan baik dapat menciptakan tekanan besar pada sumber daya perumahan perkotaan. Urbanisasi menciptakan tekanan pada perkotaan yang pada akhirnya, permukiman kumuh mulai berkembang pesat di pinggiran kota atau di wilayah perkotaan yang kurang berkembang (Satterthwaite, 2008)). Di sini, penduduk mencari perumahan yang terjangkau namun sering kali harus tinggal dalam kondisi yang sangat sulit.

Dalam konteks Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa urbanisasi yang cepat juga menjadi masalah serius. Pada tahun 2020, sekitar 13,4 juta rumah tangga tinggal di permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Tingginya laju urbanisasi, terutama di kota-kota besar, telah menciptakan tekanan besar pada perumahan perkotaan dan infrastruktur, yang berkontribusi pada pertumbuhan permukiman kumuh (BPS, 2021)

Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi adalah faktor lain yang memperburuk masalah permukiman kumuh. Ketika sebagian besar penduduk dalam suatu masyarakat menghadapi ketidaksetaraan ekonomi yang mendalam sehingga seringkali tidak mampu membeli atau menyewa perumahan yang layak. Ini memaksa sebagian besar penduduk miskin tinggal di permukiman kumuh, di mana biaya perumahan lebih terjangkau. Salah satu faktor utama yang menyebabkan permukiman kumuh di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat dan terbatasnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat menjadi hambatan serius bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan taraf hidup dan meninggalkan lingkungan permukiman kumuh (Akbar & Edelenbos, 2020). Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan spiral kemiskinan yang sulit diputuskan. Ketidaksetaraan ekonomi juga memengaruhi akses penduduk terhadap pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak (Lasaiba, 2023b). Peluang pendidikan dan pekerjaan yang terbatas sering kali membuat banyak penduduk permukiman kumuh terjebak dalam sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak stabil, yang tidak hanya membatasi mobilitas sosial tetapi juga membuat lebih rentan terhadap perubahan ekonomi yang tidak terduga.

Dalam konteks permukiman kumuh, dampak gabungan dari urbanisasi yang cepat dan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi sangat terlihat. Ketika orang berduyun-duyun ke kota-kota besar mencari pekerjaan dan peluang ekonomi, sehingga seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses perumahan yang terjangkau. Hal ini mengakibatkan banyak dari penduduk terpaksa tinggal di permukiman kumuh yang berkembang pesat di pinggiran kota atau di wilayah perkotaan yang kurang berkembang. Tingginya permintaan terhadap perumahan di kota-kota besar meningkatkan harga perumahan, membuatnya tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk. Akibatnya, permukiman kumuh menjadi satu-satunya alternatif bagi banyak individu miskin. Ini menciptakan lingkungan di mana ketidaksetaraan ekonomi tercermin dalam infrastruktur fisik dan sosial yang tidak memadai, seperti fasilitas sanitasi yang buruk, akses terbatas ke air bersih, dan layanan pendidikan yang tidak memadai. Dalam beberapa kasus, ketidaksetaraan ekonomi juga dapat mengakibatkan pemusatan lahan dan perumahan di tangan segelintir individu atau perusahaan, yang kemudian memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat luas terhadap lahan yang sesuai untuk perumahan, memperburuk masalah permukiman kumuh di mana individu dan keluarga terpaksa tinggal di lingkungan yang tidak aman dan tidak layak.

Urbanisasi yang cepat dan tingginya ketidaksetaraan ekonomi adalah dua faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan permukiman kumuh di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Urbanisasi yang tidak terkendali menciptakan tekanan pada sumber daya perumahan perkotaan (Lasaiba, 2023c), sementara ketidaksetaraan ekonomi menyebabkan banyak penduduk miskin terperangkap dalam lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak. Gabungan kedua faktor ini menyajikan tantangan kompleks dalam mengatasi masalah permukiman kumuh dan menyoroti perlunya tindakan lintas sektor dan kerja sama yang kuat untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh

Peran pemerintah dalam penanggulangan permukiman kumuh sangat penting dalam mengatasi masalah yang kompleks ini. Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa penduduk di permukiman kumuh memiliki akses yang lebih baik ke perumahan yang layak, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab

utama dalam mengatasi permukiman kumuh. Pemerintah pusat biasanya bertanggung jawab untuk merancang kebijakan nasional yang mendukung upaya penghapusan permukiman kumuh di seluruh negara, melibatkan alokasi dana, pengembangan program, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Contoh nyata dari peran pemerintah pusat dalam mengatasi permukiman kumuh adalah program "Kampung Kumuh" di Indonesia, yang dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016) pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk mengubah permukiman kumuh menjadi area yang lebih teratur dan meningkatkan kualitas hidup melalui investasi dalam infrastruktur dan layanan dasar. Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk program ini dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakannya.

Selain peran pemerintah pusat dan daerah, kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat lokal sangat penting dalam upaya penghapusan permukiman kumuh. LSM memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program penghapusan permukiman kumuh (Owa, 2016). Penduduk sering memiliki pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan bantuan teknis, advokasi, dan dukungan kepada komunitas permukiman kumuh. Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus dan solusi yang sesuai dengan kondisi setempat. Pemerintah biasanya memiliki keterbatasan dalam mengakses semua komunitas permukiman kumuh, dan kehadiran LSM dan partisipasi aktif masyarakat lokal dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya penghapusan. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah langkah penting dalam membantu komunitas permukiman kumuh meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam memberikan akses ke pendidikan berkualitas, terutama bagi anak-anak di permukiman kumuh. Peningkatan akses pendidikan akan menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi muda untuk meningkatkan prospek ekonomi di masa depan. Pelatihan keterampilan adalah cara untuk meningkatkan daya saing dan peluang pekerjaan bagi penduduk permukiman kumuh (UNICEF, 2019). Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan sektor swasta untuk menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, yang akan membantu komunitas permukiman kumuh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan (Lasaiba, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa peran pemerintah juga mencakup pengawasan dan evaluasi program penghapusan permukiman kumuh. Pemerintah harus memastikan bahwa program yang dilaksanakan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi program secara teratur dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, perubahan yang diperlukan, dan pelajaran yang dapat diterapkan pada program-program di masa depan. Peran pemerintah dalam penghapusan permukiman kumuh sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bekerja sama dengan LSM dan masyarakat lokal, dapat berkontribusi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung perbaikan kondisi permukiman kumuh. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan juga merupakan langkah penting dalam membantu komunitas permukiman kumuh meningkatkan kualitas hidup. Dengan kerja sama yang baik dan komitmen untuk mengatasi masalah ini, perubahan positif dalam kehidupan penduduk permukiman kumuh dapat tercapai.

Kolaborasi dalam Mengatasi Permukiman Kumuh

Kolaborasi dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh adalah kunci untuk mencapai perubahan positif yang berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, solusi yang lebih efektif dapat diciptakan untuk meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mengatasi masalah permukiman

kumuh. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam kerangka kerja kolaboratif ini (Habib & Researcher, 2009). Sebagai pemangku kepentingan utama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan hukum dan regulasi yang mendukung kolaborasi ini serta juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana publik dan mengawasi implementasi program-program penanggulangan permukiman kumuh. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur, yang merupakan faktor kunci dalam perbaikan kondisi permukiman kumuh. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan kerangka kerja yang stabil dan mendukung kolaborasi tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks kolaborasi yang melibatkan sektor swasta, Swarnkar et al. (2019) mencatat bahwa perusahaan dan investor dapat berperan dalam menginvestasikan sumber daya ke dalam program-program pengembangan permukiman yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan sektor swasta, sumber daya finansial dan expertise teknis dapat disalurkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan perumahan dalam permukiman kumuh (Binti Singh, 2005). Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memobilisasi komunitas, memonitor program-program penanggulangan permukiman kumuh, serta memastikan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi antara semua pihak ini bukan hanya memungkinkan berbagai sumber daya yang berbeda digunakan secara optimal, tetapi juga menciptakan peluang bagi inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang kompleks. Dengan demikian, kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai perubahan positif dalam kondisi permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan secara keseluruhan.

Sektor swasta memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya finansial dan teknis yang dapat meningkatkan kondisi perumahan di permukiman kumuh. Perusahaan-perusahaan dapat terlibat dalam program-program perbaikan permukiman, berinvestasi dalam infrastruktur, dan mengembangkan perumahan yang terjangkau. Seringkali, sektor swasta dapat membawa inovasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. Namun, penting untuk dicatat bahwa sektor swasta juga harus beroperasi dengan integritas dan komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM, kelompok advokasi, dan organisasi nirlaba, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis, advokasi, dan pendampingan kepada masyarakat kumuh. Mereka seringkali dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus, memberikan pelatihan, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan menjadi pengawas independen, organisasi masyarakat sipil juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, berperan sebagai mediator antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat kumuh, memfasilitasi komunikasi yang efektif dan pemecahan konflik. Kolaborasi ini menawarkan beberapa manfaat:

1. Solusi yang dihasilkan menjadi lebih holistik karena berbagai pihak membawa perspektif yang berbeda dalam pemecahan masalah.
2. Penggabungan sumber daya finansial, teknis, dan manusia dari berbagai sektor memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan menghindari tumpang tindih dalam program.
3. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, masyarakat kumuh dapat lebih aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memberikan rasa kepemilikan atas perubahan yang terjadi di lingkungan.
4. Kolaborasi ini dapat menciptakan inovasi dalam pendekatan penanggulangan permukiman kumuh, termasuk pengembangan teknologi baru, model perumahan yang lebih terjangkau, dan program pelatihan keterampilan yang inovatif.

Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi dalam kolaborasi ini:

1. Berbagai pihak mungkin memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan ini.
2. Masih mungkin terdapat keterbatasan dalam anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia, bahkan dengan penggabungan sumber daya.
3. Masalah koordinasi antara berbagai pihak dapat menjadi kompleks dan memerlukan manajemen yang baik untuk memastikan program-program berjalan dengan lancar.

Dalam menghadapi tantangan ini, kesadaran akan manfaat kolaborasi dan komitmen bersama untuk mencapai perubahan positif dalam permukiman kumuh menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

Salah satu contoh kolaborasi sukses dalam mengatasi permukiman kumuh adalah program "*Housing for All*" di India. Program ini melibatkan pemerintah India, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah menyediakan perumahan yang terjangkau bagi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh di seluruh India. Melalui program ini, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan perumahan terjangkau, sementara sektor swasta ikut berperan dalam pengembangan proyek-proyek perumahan. Organisasi masyarakat sipil memberikan dukungan teknis dan mendampingi masyarakat dalam mengakses perumahan yang layak. Kolaborasi ini telah berhasil menyediakan jutaan unit perumahan terjangkau dan telah memberikan dampak positif pada kehidupan penduduk permukiman kumuh di India (Shah, 2018).

Kolaborasi dalam mengatasi permukiman kumuh adalah pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah kompleks ini. Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, dapat menciptakan solusi yang lebih holistik, efisien, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, dapat meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh. Dengan komitmen bersama, perubahan positif dapat terwujud, memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Harapan untuk Masa Depan

Harapan untuk masa depan dalam mengatasi masalah permukiman kumuh, yang merupakan masalah global yang kompleks, sangatlah penting. Upaya bersama dari pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal merupakan kunci dalam merumuskan solusi yang efektif untuk masalah ini. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program perbaikan permukiman kumuh (UNDP, 2016), terdapat harapan besar bahwa masalah permukiman kumuh dapat dikurangi, dan kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh dapat ditingkatkan. Pertama-tama, penting untuk mengakui bahwa mengatasi permukiman kumuh adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan kerjasama berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal ini, pemerintah harus memastikan keberlanjutan program-program penanggulangan permukiman kumuh, termasuk mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung program-program ini dan mengawasi pelaksanaannya dengan cermat. Selain itu, pemerintah harus menjaga konsistensi dalam kebijakan perumahan dan pengembangan perkotaan untuk mencegah pertumbuhan permukiman kumuh yang lebih lanjut.

LSM dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam memantau pelaksanaan program-program penanggulangan permukiman kumuh. Harapan adalah bahwa LSM dapat terus memberikan dukungan teknis, advokasi, dan bantuan kepada masyarakat kumuh serta berperan sebagai pengawas independen yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Sebagai hasilnya, masyarakat kumuh dapat merasa didengar dan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan permukiman kumuh adalah aspek kunci dalam mencapai perubahan yang berkelanjutan (Lasaiba, 2023a). Harapan adalah bahwa masyarakat kumuh akan terlibat dalam

setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, yang merupakan tentang memberi suara dalam proses ini dan memberikan rasa memiliki terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan rasa memiliki ini, masyarakat kumuh akan lebih termotivasi untuk merawat dan merawat perubahan yang telah terjadi.

Di Indonesia, salah satu negara dengan tingkat permukiman kumuh yang tinggi, harapan untuk masa depan adalah melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah permukiman kumuh. Program-program seperti "Kampung Kumuh" dan "Program Kota Tanpa Kumuh" telah menjadi langkah awal yang baik dalam mengubah wajah permukiman kumuh di Indonesia (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016). Namun, harapannya adalah bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus meningkatkan upaya mereka dalam mengatasi masalah ini dan mendorong inovasi dalam pendekatan penanggulangan permukiman kumuh, termasuk pengembangan teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan kondisi perumahan, model perumahan yang lebih terjangkau, dan program pelatihan keterampilan yang inovatif. Inovasi-inovasi ini dapat membantu mengatasi tantangan yang terus berkembang dalam penanggulangan masalah permukiman kumuh.

Dengan demikian, harapan untuk masa depan dalam mengatasi masalah permukiman kumuh adalah melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah permukiman kumuh, peningkatan kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh, dan komitmen berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung upaya ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat lokal, harapan ini dapat menjadi kenyataan di Indonesia dan di seluruh dunia.

KESIMPULAN

Permasalahan permukiman kumuh merupakan tantangan global yang kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat dan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi menjadi pemicu utama pertumbuhan permukiman kumuh. Urbanisasi yang tidak terkendali menciptakan tekanan besar pada sumber daya perumahan perkotaan, sementara ketidaksetaraan ekonomi membatasi akses penduduk miskin ke perumahan yang layak. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil adalah kunci dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah memiliki peran utama dalam merancang kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengawasan program pengentasan permukiman kumuh. Sektor swasta dapat memberikan sumber daya finansial dan teknis yang dibutuhkan, sementara organisasi masyarakat sipil dapat membantu melibatkan masyarakat kumuh dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kolaborasi ini memungkinkan solusi yang lebih efektif dan holistik untuk meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan, dengan tujuan mengentaskan permukiman kumuh secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Agustina, N. A., Prasita, V. D., Kusuma, A., & Rosana, N. (2023). *Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Pesisir Berbasis Daya Dukung Lingkungan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global*. Hang Tuah University Press.
- Akbar, P. N. G., & Edelenbos, J. (2020). Social Impacts of Place-Making in Urban Informal Settlements: A Case Study of Indonesian Kampung. *Social Sciences*, 9(6). <https://doi.org/10.3390/socsci9060104>
- Anisyaturrobiah, A. (2021). Dampak Urbanisasi Terhadap Penyediaan Pemukiman Dan Perumahan Di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.136>
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2016). *Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024*. Badan Pengembangan Infrastruktur

- Wilayah. <https://pu.go.id/pustaka/biblio/rencana-strategis-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tahun-2020-2024/BKKL7>
- Binti Singh. (2005). Slums, Rehabilitation and Government Policy: the case of the Slum Rehabilitation Programme in Mumbai. *Urban Policy and Research*. <https://www.researchgate.net/publication/312806446>
- BPS. (2021). *BPS: Laju pertumbuhan penduduk Indonesia melambat, ini penyebabnya*. Yahoo Berita. <https://id.berita.yahoo.com/bps-laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-100954765.html>
- Crispi, G., Main, R. L.-L., Zhang, H., & Gatsinzi, J. R. (2022). Slum Upgrading Legal Assessment Tool. *Un-Habitat*, 2. www.unhabitat.org/hsnumber:HS/005/22E
- Dickson-Gomez, J., Nyabigambo, A., Rudd, A., Ssentongo, J., Kiconco, A., & Mayega, R. W. (2023). Water, Sanitation, and Hygiene Challenges in Informal Settlements in Kampala, Uganda: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(12). <https://doi.org/10.3390/ijerph20126181>
- Gilbert, A. (2005). Book Review: The challenge of slums: global report on human settlements 2003. In *Progress in Human Geography* (Vol. 29, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/030913250502900122>
- Habib, E., & Researcher, I. (2009). The role of government and NGOs in slum development : The case of Dhaka Development in Practice The role of government and NGOs in slum development: the case of Dhaka City. *Routledge Publishing*, 19(2), 259–365. <https://doi.org/10.1080/09614520802689576>
- Habitat for Humanity. (2018). *Building the Way Out of Poverty: Habitat for Humanity's Strategy for Slum Upgrading and Prevention*. Habitat for Humanity International. <https://www.habitat.org/stories/building-and-beyond-5-additional-ways-habitat-works-fulfill-our-mission>
- Herdiansah, A. G. (2017). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Nukhbatul 'Ulum*, 3(1), 324–341. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.27>
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Smart Urban Service Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. *Journal Moderat*, 6(1), 29–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3156>
- Khan, S. S., Lintelo, D. Te, & Macgregor, H. (2023). Framing 'slums': global policy discourses and urban inequalities. *Environment and Urbanization*, 35(1), 74–90. <https://doi.org/10.1177/09562478221150210>
- Lasaiba, M. A. (2021). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Produktivitas Pertanian Terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Jurnal Geografi, Lingkungan & Kesehatan*, 1(1), 44–51. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jglk/article/view/9980>
- Lasaiba, M. A. (2023a). Analisis Multikriteria Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) terhadap Bahaya dan Resiko Banjir di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing (JGRS)*, 4(2), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jgrs.ft.unila.146>
- Lasaiba, M. A. (2023b). Daur Ulang Kreatif : Menumbuhkan Kreativitas Dan. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 06(05), 567–576. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jurnalpkm.v6i5.17215>
- Lasaiba, M. A. (2023c). Geografi Manusia dalam Konteks Perspektif Spasial. *GEOFORUM. Jurnal Geografi Dan Pendidikan Geografi*, 2(2), 81–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/geoforumvol2iss2pp81-99>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181.
- Nss, L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(1), 82–103. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>

- Oluwafemi. (2013). *Poverty Alleviation in Lagos Urban Informal Settlements : A Sustainable Livelihood Approach*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:201639090>
- Owa, O. (2016). The Role Of Non-Governmental Organizations (Ngos) In Strengthening Civil Society And Democratic Development. *International Digital Organization For Scientific Research. Idosr Journal Of Arts And Management*, 2(2), 91–98. <https://www.researchgate.net/publication/341232312>
- Patri, P., Sharma, P., & Patra, S. K. (2022). A multidimensional model for cyclone vulnerability assessment of urban slum dwellers in India: A case study of Bhubaneswar city. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253561526>
- Ramadhano, I., & Lie, G. (2023). Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia. *UNES Law Review*, 6(2), 5978–5990.
- Saini, A. (2016). Problems and Prospects of MSMEs in India. *Research Gate*, 1(July), 1–38. <https://www.pdfdrive.com/problems-and-prospects-of-agro-based-industries-in-india-e92072170.html>
- Satterthwaite, D. (2008). Cities' contribution to global warming: notes on the allocation of greenhouse gas emissions. *Environment and Urbanization*, 20(2), 539–549. <https://doi.org/10.1177/0956247808096127>
- Shah, N. (2018). Housing for All in India and Its Future in Sustainable Development. *Journal of Global Initiatives*, 13(1), 1–24. <https://doi.org/10.32727/11.2018.231>
- UN-Habitat. (2016). Slum Almanac 2015/2016. Tracking improvement in the lives of slum dwellers. *Participatory Slum Upgrading Programme*, 98. <https://unhabitat.org/slum-almanac-2015-2016-0>
- UNDP. (2016). Sustainable Urbanisation Strategy: UNDP's Support to Sustainable, Inclusive and Resilient Cities in the Developing World. *United Nations Development Programme*, 5. <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/sustainable-urbanization-strategy.html>
- UNICEF. (2019). *Harnessing the Power of Data for Girls*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/documents/harnessing-power-data-girls-taking-stock-and-looking-ahead-2030>
- Warsilah, H. (2017). *Pembangunan inklusif dan kebijakan sosial di Kota Solo, Jawa Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- WHO. (2018). Guidelines on sanitation and health. In *World Health Organization*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274939/9789241514705-eng.pdf?ua=1>
- Zubaidah, S., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Widianingsih, I. (2023). An overview of slum upgrading programs in developing countries: Case study in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 10(2), 2264021. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2264021>